



**LAPORAN HASIL
EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2020**



**INSPEKTORAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
I N S P E K T O R A T
Jl. Soekarno – Hatta Giri Menang Gerung Telp. (0370) 6186366
Fax : (0370) 6186366, Kode Pos 83363
Email : inspektoratkablobar@gmail.com
Web-Email : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

Gerung, 30 Maret 2021

Kepada

Yth. : Bupati Lombok Barat ,
di -

Gerung

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/212 /Inspektorat/ 2021

No	Jenis Surat-Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020.	1 (Satu) Gabung.	Disampaikan dengan Hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Inspektur
Kabupaten Lombok Barat

H. Ilham S.Pd, M.Pd
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Gerung
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Lombok Barat
4. Peringgal

**Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Mandiri, Sejahtera dan Berprestasi
Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT
JI. SOEKARNO-HATTA GIRI MENANG GERUNG TELP. (0370) 6186366
Fax : (0370) 6186366, Kode Pos 83363
Email : inspektoratkablobar@gmail.com
Web-mail : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.


Plt. Inspektur,
H. Ilham, S.Pd, M.Pd
NIP. 19651231 198803 1 240



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
INSPEKTORAT
JI. SOEKARNO-HATTA GIRI MENANG GERUNG TELP. (0370) 6186366
Fax : (0370) 6186366, Kode Pos 83363
Email : inspektoratkablobar@gmail.com
Web-mail : www.inspektorat.lombokbaratkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2020**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di Kabupaten Lombok Barat secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil/outcome) instansi sesuai yang diamanahkan dalam RPJM/RPJMD.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktifitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi perangkat daerah. Evaluasi implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dilakukan oleh APIP, untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja bagi manajemen pemerintahan.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi terhadap 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Lombok Barat pada tahun 2020, diperoleh hasil evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) rata-rata 84,47 dengan kategori A (Memuaskan). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 kami menyampaikan saran/rekomendasi kepada Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan kepada seluruh jajarannya sebagai berikut:

1. Dalam hal Format Laporan Kinerja, agar:
 - a. Laporan Kinerja seluruhnya menampilkan data penting Indikator Kinerja Sasaran;
 - b. Laporan Kinerja disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
 - c. Laporan Kinerja menyajikan upaya perbaikan kedepan;
2. Dalam hal Mekanisme Penyusunan, agar :
 - a. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja didukung dengan data yang andal dan memadai;
 - b. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja didukung dengan adanya SOP atau surat edaran yang berisi data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) dapat diyakini keandalannya;
 - c. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) diketahui oleh unit kerja terkait
3. Dalam hal Subtansi, agar:
 - a. Terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang sebagian masih berorientasi output, agar diubah menjadi berorientasi outcome;
 - b. Sasaran Strategis disajikan perbandingan capaian kinerjanya dan analisa atas capaian kinerjanya yang dianggap memadai sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dalam perbaikan implementasi, agar:
 - a. Mengembangkan sistem perencanaan yang berbasis aplikasi teknologi informasi (*e-planing*) secara optimal.
 - b. Mengembangkan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja berbasis aplikasi teknologi informasi.

- c. Memanfaatkan hasil penilaian SAKIP sebagai dasar kebijakan *reward* dan *punishment*, dalam :
- 1). Kebijakan pembinaan bidang sumber daya manusia, yaitu :
 - Sebagai dasar penilaian SKP
 - Sebagai pertimbangan promosi dan mutasi
 - 2) Kebijakan bidang perencanaan dan penganggaran yaitu :
 - Sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran, penyusunan RKPD dan reviu RPJMD
 - Sebagai dasar TAPD dalam menentukan alokasi anggaran OPD
 - 3) Kebijakan pengawasan yaitu :
 - Sebagai dasar penyusunan analisis dan peta risiko
 - Sebagai dasar penyusunan kebijakan pengawasan untuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).



H. Ilham, S.Pd, M.Pd
NIP. 19651231-198803 1 240

BAB I PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM EVALUASI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi system akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- e. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 800/18.f/Inspektorat/2021, Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020.

2. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang AKIP.

Salah satu sasaran dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dibangun dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*).

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Sebagai suatu sistem manajemen, Sistem AKIP menerapkan siklus *Planning, Do, Check dan Act (P-D-C-A)* di mana pada masing-masing proses dibutuhkan suatu evaluasi sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya dalam bentuk umpan balik dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (*continues improvement*). Evaluasi ini juga bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penerapan Sistem AKIP di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI dengan kategori "B" atau termasuk dalam karakteristik instansi pemerintah dengan penerapan sistem manajemen akuntabilitas kinerja yang baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Prestasi ini merupakan suatu pencapaian level nasional yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Untuk mengetahui sejauh mana organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lombok Barat mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah di Tahun selanjutnya, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Barat secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

3. TUJUAN EVALUASI

- a. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat atas implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP;
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP mencakup :

- 1) Penilaian terhadap perencanaan kinerja, termasuk di dalamnya perencanaan strategis, dan perencanaan kinerja tahunan;
- 2) Penilaian terhadap pengukuran kinerja, termasuk di dalamnya pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran;
- 3) Penilaian terhadap pelaporan kinerja, termasuk di dalamnya pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja;
- 4) Penilaian terhadap evaluasi internal, termasuk di dalamnya pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi; serta
- 5) Penilaian terhadap pencapaian sasaran/kinerja organisasi, meliputi indikator kinerja out-put dan indikator kinerja out-come.

5. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas AKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan penilaian dengan metodologi ini menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut :

1	Perencanaan Kinerja		30.00 %
	a	Rencana Strategi	10.00 %
	b	Perencanaan Kinerja	20.00 %
2	Pengukuran Kinerja		25.00 %
	a	Pemenuhan Pengukuran	5.00 %
	b.	Kualitas Pengukuran	12.50 %
	c.	Implementasi Pengukuran	7.50 %
3	Pelaporan Kinerja		15.00 %
	a	Pemenuhan Pelaporan	3.00 %
	b.	Penyajian Informasi Kinerja	7.50 %
	c.	Pemanfaatan Informasi Kinerja	4.50 %
4	Evaluasi Internal		10.00 %
	a	Pemenuhan Evaluasi	2.00 %
	b.	Kualitas Evaluasi	5.00 %
	c.	Pemanfaatan Evaluasi	3.00 %
5	Pencapaian Sasaran		20.00 %
	a	Output	7.50 %
	b	Outcome	12.50 %

Hasil evaluasi Sistem AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dengan parameter sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	>90 – 100	Sangat memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , memimpin perubahan, bekerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk menejemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memilki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

6. GAMBARAN UMUM EVALUATAN

Sasaran Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Dan Pemukiman
5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Dinas Pemadam Kebakaran
7	Dinas Sosial
8	Dinas Tenaga Kerja
9	Dinas Ketahanan Pangan
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
19	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan
21	Dinas Pariwisata
22	Dinas Pertanian
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
24	Sekretariat Daerah
25	Sekretariat DPRD
26	Inspektorat
27	Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31	Badan Pendapatan Daerah
32	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
33	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
34	Kecamatan Sekotong
35	Kecamatan Lembar
36	Kecamatan Gerung
37	Kecamatan Labuapi
38	Kecamatan Kediri
39	Kecamatan Kuripan
40	Kecamatan Narmada
41	Kecamatan Lingsar
42	Kecamatan Gunungsari
43	Kecamatan Batulayar

7. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP

a. Materi Evaluasi

1). KOMPONEN PENILAIAN

Komponen akuntabilitas kinerja yang dinilai dalam evaluasi AKIP Kabupaten Lombok Barat yaitu :

- a) Perencanaan kinerja;
- b) Pengukuran kinerja;
- c) Pelaporan kinerja;
- d) Evaluasi kinerja internal; dan
- e) Pencapaian kinerja.

Penilaian terhadap Komponen Akuntabilitas Kinerja meliputi :

- a) Aspek kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen kinerja;
- b) Aspek kualitas material substansif isi dokumen-dokumen kinerja;
- c) Aspek pemanfaatan/implementasi dokumen-dokumen kinerja, terkait keselarasan dan keterkaitan terhadap dokumen-dokumen perencanaan lain, dokumen-dokumen penganggaran dan dokumen-dokumen pelaporan.

2). SUB-KOMPONEN PENILAIAN

Untuk masing-masing komponen, penilaian dilakukan untuk setiap sub-komponen penilaian sebagai berikut :

- a). Penilaian atas komponen Perencanaan kinerja dilakukan atas 2 (dua) sub-komponen, yaitu :

- 1) Perencanaan Strategis.

Dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya. Sub-komponen perencanaan strategis (*strategic planning*) meliputi pemenuhan dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD kualitas material substantif dalam dokumen Renstra-OPD dan pemanfaatan dokumen Renstra-OPD dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya.

- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan :

Meliputi pemenuhan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) OPD kualitas material substantif dalam dokumen RKT-OPD dan PK-OPD, dan pemanfaatan dokumen RKT-OPD dan PK-OPD

- b). Penilaian atas komponen Pengukuran kinerja dilakukan atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu :
- 1) Sub-komponen Pemenuhan Pengukuran :
Meliputi pemenuhan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD dan mekanisme pengumpulan hasil pengukuran data kinerja.
 - 2) Sub-komponen kualitas pengukuran :
Meliputi kualitas material substantif dalam dokumen IKU-OPD, keselarasan dan keterkaitan IKU-OPD dengan IKU Kabupaten Lombok Barat, keandalan data kinerja hasil pengukuran dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - 3) Sub-komponen implementasi pengukuran : Meliputi pemanfaatan dokumen IKU-OPD dan hasil pengukurannya dalam penyusunan dokumen-dokumen terkait lainnya.
- c). Penilaian atas komponen Pelaporan kinerja dilakukan atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu :
- 1) Sub-komponen pemenuhan pelaporan :
Meliputi pemenuhan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD
 - 2) Sub-komponen penyajian informasi kinerja :
Meliputi kualitas material substantif dalam dokumen LKjIP-OPD dan keandalan data kinerja yang dilaporkan.
 - 3) Sub-komponen pemanfaatan informasi kinerja :
Meliputi pemanfaatan data kinerja dalam LKjIP-OPD dalam rangka perbaikan aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan kinerja.
- d). Penilaian atas komponen Evaluasi kinerja internal dilakukan atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu :
- 1) Sub-komponen pemenuhan evaluasi internal :
Meliputi pemenuhan dokumen pedoman evaluasi internal dan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pencapaian sasaran kinerja secara berkala.

- 2) Sub-komponen kualitas evaluasi internal :
Meliputi kompetensi, supervisi, keberhasilan program dan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.
 - 3) Sub-komponen pemanfaatan hasil evaluasi internal :
Meliputi pemanfaatan hasil evaluasi internal dalam perbaikan proses perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja (SAKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja OPD
- e). Penilaian atas komponen Pencapaian kinerja dilakukan atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu :
- 1) Sub-komponen kinerja yang dilaporkan dalam bentuk keluaran (*output*) :
Meliputi realisasi target keluaran (*output*), perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan tingkat keandalan data.
 - 2) Sub-komponen kinerja yang dilaporkan dalam bentuk hasil (*outcome*):
Meliputi realisasi target hasil (*outcome*), perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan tingkat keandalan data.

3). KRITERIA PENILAIAN

- a) Dari setiap sub-komponen penilaian, dibagi ke dalam beberapa daftar pertanyaan/isian sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut.
- b) Jawaban atau isian atas pertanyaan/isian dapat berupa nilai absolute dan nilai relatif, tergantung dari materi pertanyaan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
- c) Nilai absolute dapat berupa jawaban/isian ya/tidak untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Nilai relatif berupa jawaban/isian a/b/c/d/e untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "*judgement*" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
- d) Untuk nilai absolute, setiap jawaban "Ya" diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" diberikan nilai 0.

b. Dokumen Evaluasi

Terkait dengan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di tingkat OPD. Dokumen-dokumen yang menggambarkan AKIP di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- 1) Seluruh OPD telah memiliki dokumen Rencana Strategi Tahun 2020.
- 2) Seluruh OPD telah memiliki dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2020.
- 3) Seluruh OPD telah memiliki Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020.
- 4) Seluruh OPD telah memiliki dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dan Tahun 2021.
- 5) Seluruh OPD telah memiliki dokumen Laporan Kinerja Instansi Tahun 2020.
- 6) Evaluasi implementasi SAKIP telah dilakukan pada 43 OPD setiap tahun.
- 7) Seluruh OPD telah membuat Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja Tahun 2020
- 8) Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi belum dilaksanakan secara tersistem.
- 9) Laporan Evaluasi Program belum seluruhnya dibuat oleh OPD
- 10) Seluruh OPD telah membuat cascading kinerja dari Level Eselon II, III dan IV.
- 11) Dalam rangka transparansi, dokumen-dokumen tersebut belum seluruhnya dipublikasikan melalui website resmi masing-masing OPD dan website Pemerintah Daerah

8. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB Nomor : LEV-609/PW23/3/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 dengan 7 rekomendasi sebagai berikut :

- a. Memperhatikan syarat indikator kinerja (memenuhi kriteria SMART) baik dalam penyusunan indikator dan menetapkan target yang relevan dan memenuhi kriteria target yang baik;

- b. Memperbaiki Dokumen perencanaan OPD yang belum sesuai dengan ketentuan;
- c. Menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada seluruh OPD sampai dengan indikator kinerja individu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- d. Melakukan Monitoring dan reuiu secara berkala terhadap pencapaian target RPJMD dan Renstra OPD;
- e. Menyajikan informasi tentang analisis penggunaan Sumber Daya dalam Laporan Kinerja;
- f. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran dan monitoring kinerja berdasarkan IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan ditindaklanjuti dengan *Incentive/Merit System* (Sistem Penilaian Kinerja Pegawai);
- g. Mempublikasikan Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Laporan Kinerja kepada Masyarakat dan *Stakeholder*;

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah ditindak-lanjuti dengan optimal namun masih terdapat rekomendasi yaitu penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada seluruh OPD sampai dengan indikator kinerja individu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, penyajian informasi tentang analisis penggunaan sumber daya dalam laporan kinerja dan publikasi atas Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan laporan Kinerja masih dalam proses penyelesaian.

BAB II HASIL EVALUASI

1. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan Hasil Penilaian atas 5 (lima) Komponen Penilaian pada 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 diperoleh hasil untuk masing-masing komponen sebagai berikut :

NO	SKPD	NILAI (%)	KATEGORI	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan	88.49%	A	Memuaskan
2	Inspektorat	87.98%	A	Memuaskan
3	Sekretariat Dewan	87.52%	A	Memuaskan
4	Badan Pendapatan Daerah	86.80%	A	Memuaskan
5	Bappeda	86.69%	A	Memuaskan
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	86.60%	A	Memuaskan
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86.34%	A	Memuaskan
8	Dinas Lingkungan Hidup	86.26%	A	Memuaskan
9	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	86.22%	A	Memuaskan
10	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	85.98%	A	Memuaskan
11	Rsud Ppp	85.89%	A	Memuaskan
12	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	85.88%	A	Memuaskan
13	Dinas Perhubungan	85.86%	A	Memuaskan
14	Dinas Pu, Dan Penataan Ruang	85.82%	A	Memuaskan
15	Sekretariat Daerah	85.77%	A	Memuaskan
16	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	85.77%	A	Memuaskan
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	85.73%	A	Memuaskan
18	Dinas Pariwisata	85.51%	A	Memuaskan
19	Bakesbangpol	85.26%	A	Memuaskan
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan	84.93%	A	Memuaskan
21	Kantor Camat Gunungsari	84.87%	A	Memuaskan
22	Dinas Pemadam Dan Kebakaran	84.71%	A	Memuaskan
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	84.56%	A	Memuaskan
24	Dinas Pertanian	84.28%	A	Memuaskan
25	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	84.27%	A	Memuaskan
26	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	84.03%	A	Memuaskan
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	83.93%	A	Memuaskan
28	Kantor Camat Sekotong	83.91%	A	Memuaskan

NO	SKPD	NILAI (%)	KATEGORI	KETERANGAN
29	Kantor Camat Labuapi	83.55%	A	Memuaskan
30	Kantor Camat Batulayar	83.50%	A	Memuaskan
31	Kantor Camat Kediri	83.22%	A	Memuaskan
32	Dinas Koperasi Ukm	83.19%	A	Memuaskan
33	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	82.70%	A	Memuaskan
34	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82.60%	A	Memuaskan
35	Kantor Camat Narmada	82.58%	A	Memuaskan
36	Kantor Camat Lingsar	82.50%	A	Memuaskan
37	Pelaksana Bpbd	82.34%	A	Memuaskan
38	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Capil	82.02%	A	Memuaskan
39	Dinas Tenaga Kerja	81.95%	A	Memuaskan
40	Kantor Camat Kuripan	81.44%	A	Memuaskan
41	Kantor Camat Gerung	80.31%	A	Memuaskan
42	Kantor Camat Lembar	80.25%	A	Memuaskan
43	Dinas Sosial	80.07%	A	Memuaskan
JUMLAH		84.47%		

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Barat dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 memperoleh hasil 84,47 Kategori A (Memuaskan),

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah memperoleh nilai dengan kategori A (Memuaskan). Rincian Hasil Evaluasi **terlampir**.

2. HASIL EVALUASI PER KOMPONEN KINERJA

Rincian hasil evaluasi per komponen kinerja 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 dengan hasil evaluasi 84,47 Kategori A (Memuaskan) tersebut dirinci berdasarkan komponen kinerja sebagai berikut :

	Komponen	Bobot (%)	Nilai	
			Tahun 2019	Tahun 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	27,08	27,45
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,30	20,62
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,65	12,95
d.	Evaluasi Kinerja	10	7,50	7,64
e.	Capaian Kinerja	20	15,70	15,81
Nilai Hasil Evaluasi		100	83, 23	84,47
Kategori			A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Nilai tersebut merupakan akumulasi dari hasil evaluasi seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 terhadap 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah.

Uraian hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja pada pada 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan hasil evaluasi 27,45 dari nilai maksimal 30,00, dengan rincian masing-masing komponen sebagai berikut :

1) Perencanaan Strategis

Untuk Sub Komponen Perencanaan Strategis memperoleh nilai 8,83 dari nilai maksimal 10,00

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan :

- a) Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode Tahun 2019 - 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2024 dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah juga telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk periode Tahun 2019 - 2024 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- b) RPJMD Pemerintah Daerah Dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah telah memuat adanya visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan, target menengah dan target program.
- c) RPJMD telah dipublikasikan kepada masyarakat dan stakeholder melalui website Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedangkan untuk Rencana Strategis masih terdapat beberapa OPD yang belum mempublikasikan dokumennya.
- d) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil indikator kinerja dan target kinerja telah memenuhi kriteria yang baik serta selaras dengan RPJMD/Renstra selaras dengan RPJMN/RPJM.
- e) RPJMD/Renstra belum maksimal dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.

2) **Perencanaan Kinerja Tahunan**

Untuk Sub Komponen Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai 18,62 dari nilai maksimal 20,00

- a) Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan yaitu RKPD Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Pemerintah Daerah maupun OPD.
- b) Implementasi Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*).
- c) Masih terdapat beberapa OPD yang belum mempublikasikan dokumen Perjanjian Kinerja baik melalui website Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun website OPD.

b. **Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja pada pada 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan hasil evaluasi 20,62 dari nilai maksimal 25,00, dengan rincian masing-masing komponen sebagai berikut :

1) **Pemenuhan Pengukuran**

Untuk Sub Komponen Pemenuhan Pengukuran memperoleh nilai 4,96 dari nilai maksimal 5,00

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa pemenuhan pengukuran telah optimal, namun masih terdapat beberapa OPD yang belum mempublikasikan IKU baik melalui website Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun website OPD

2) **Kualitas Pengukuran**

Untuk Sub Komponen Kualitas Pengukuran memperoleh nilai 11,02 dari nilai maksimal 12,50

Hasil evaluasi atas kualitas pengukuran IKU Organisasi Perangkat daerah telah memenuhi kriteria indikator yang baik namun perlu lebih dioptimalkan dengan pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, namun demikian masih juga terdapat kelemahan yaitu pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi dan belum menetapkan target kinerja individu yang mengacu pada IKU.

3) Implementasi Pengukuran

Untuk Sub Komponen Implementasi Pengukuran memperoleh nilai 4,65 dari nilai maksimal 7,50

Berdasarkan hasil evaluasi atas Implementasi Pengukuran Kinerja pada beberapa OPD IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja OPD, IKU belum digunakan belum menetapkan target kinerja individu, pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan pemberian *reward and punishment*, dan pengukuran kinerja atas rencana aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja pada pada 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan hasil evaluasi 12,95 dari nilai maksimal 15,00, dengan rincian masing-masing komponen sebagai berikut :

1) Pemenuhan Pelaporan

Untuk Sub Komponen Pemenuhan Pelaporan memperoleh nilai 2,90 dari nilai maksimal 3,00

Hasil evaluasi Pemenuhan Pelaporan telah optimal, namun beberapa LAKIP OPD belum dipublikasikan baik di *website* Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun di *website* masing-masing OPD.

2) Penyajian Informasi Kinerja

Untuk Sub Komponen Informasi Kinerja memperoleh nilai 6,46 dari nilai maksimal 7,50

Hasil evaluasi atas penyajian Informasi Kinerja belum optimal, masih terdapat OPD yang belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Untuk Sub Komponen Informasi Kinerja memperoleh nilai 3,59 dari nilai maksimal 4,50.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan Informasi Kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

d. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi Internal pada pada 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan hasil evaluasi 7,64 dari nilai maksimal 15,00, dengan rincian masing-masing komponen sebagai berikut :

1) Pemenuhan Evaluasi

Untuk Sub Komponen Pemenuhan Evaluasi memperoleh nilai 1,85 dari nilai maksimal 2,00

Hasil evaluasi Pemenuhan Evaluasi telah optimal.

2) Kualitas Evaluasi

Untuk Sub Komponen Kualitas Evaluasi memperoleh nilai 3,83 dari nilai maksimal 5,00

Hasil evaluasi atas Kualitas Evaluasi perlu ditingkatkan dengan memberikan rekomendasi peningkatan kinerja serta dalam rangka memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Untuk Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai 1,97 dari nilai maksimal 3,00

Hasil evaluasi atas pemanfaatan evaluasi belum optimal, hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program pada masa yang akan datang.

e. Evaluasi Atas Pencapaian Sasaran /Kinerja Organisasi

Hasil evaluasi atas Pencapaian sasaran/kinerja organisasi pada pada 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan hasil evaluasi 15,81 dari nilai maksimal 20,00, dengan rincian masing-masing komponen sebagai berikut :

1) OUTPUT

Untuk Sub Komponen Output memperoleh nilai 5,41 dari nilai maksimal 7,50 Hasil penilaian atas Capaian Output yaitu : target dapat dicapai, capaian kinerja belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi kinerja sebagian besar dapat diandalkan.

2) OUTCOME (12,5%)

Untuk Sub Komponen Outcome memperoleh nilai 10,40 dari nilai maksimal 12,50

Hasil penilaian atas Capaian Output : target dapat dicapai, capaian kinerja belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi kinerja sebagian besar dapat diandalkan.

3. Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 kami menyampaikan saran/rekomendasi kepada Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar :

a. Dalam hal Format Laporan Kinerja, agar:

- 1) Laporan Kinerja seluruhnya menampilkan data penting Indikator Kinerja Sasaran ;
- 2) Laporan Kinerja disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- 3) Laporan Kinerja menyajikan upaya perbaikan kedepan;

b. Dalam hal Mekanisme Penyusunan, agar:

- 1) Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja didukung dengan data yang memadai;
- 2) Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja didukung dengan adanya SOP atau surat edaran yang berisi Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) dapat diyakini keandalannya;
- 3) Menyajikan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya dalam laporan kinerja.

- c. Dalam hal Subtansi, agar:
- 1) Terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang sebagian masih berorientasi output, agar diubah menjadi berorientasi outcome;
 - 2) Sasaran Strategis disajikan perbandingan capaian kinerjanya dan analisa atas capaian kinerjanya yang dianggap memadai sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Menyusun *Cascading* Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dari level struktural (Eselon II, III,IV) sampai dengan individu pegawai (staf).
- d. Dalam perbaikan implementasi, agar:
- 1) Mengembangkan sistem perencanaan yang berbasis aplikasi teknologi informasi (*e-planing*) secara optimal.
 - 2) Mengembangkan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja berbasis aplikasi teknologi informasi.
 - 3) Mempublikasikan Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Laporan Kinerja kepada masyarakat dan *stakeholder*.
 - 4) Memanfaatkan hasil penilaian SAKIP sebagai dasar kebijakan *reward* dan *punishment*, dalam :
 - a). Kebijakan pembinaan bidang sumber daya manusia, yaitu :
 - Sebagai dasar penilaian SKP
 - Sebagai pertimbangan promosi dan mutasi
 - b) Kebijakan bidang perencanaan dan penganggaran yaitu :
 - Sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran, penyusunan RKPD dan rewiu RPJMD
 - Sebagai dasar TAPD dalam menentukan alokasi anggaran OPD
 - c) Kebijakan pengawasan yaitu :
 - Sebagai dasar penyusunan analisis dan peta risiko
 - Sebagai dasar penyusunan kebijakan pengawasan untuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Demikian kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 untuk dapat dijadikan acuan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja . Kami menyampaikan penghargaan kepada Bapak Bupati beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gerung, 30 Maret 2021

Plt. Inspektur,

H. Iham, S.Pd, M.Pd
NIP. 19651231 198803 1 240

CAPAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2019 dan 2020
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

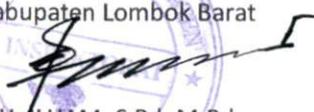
NO	SKPD	2019			2020			SELISIH	KETERANGAN
		NILAI (%)	KATEGORI		NILAI (%)	KATEGORI			
1	SEKRETARIAT DAERAH	84.82%	A	MEMUASKAN	85.77%	A	MEMUASKAN	0.95%	MENINGKAT
2	SEKRETARIAT DEWAN	84.65%	A	MEMUASKAN	87.52%	A	MEMUASKAN	2.87%	MENINGKAT
3	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	86.15%	A	MEMUASKAN	86.60%	A	MEMUASKAN	0.45%	MENINGKAT
4	DINAS PEMADAM DAN KEBAKARAN	83.99%	A	MEMUASKAN	84.71%	A	MEMUASKAN	0.72%	MENINGKAT
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	85.53%	A	MEMUASKAN	85.73%	A	MEMUASKAN	0.20%	MENINGKAT
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	82.50%	A	MEMUASKAN	83.93%	A	MEMUASKAN	1.43%	MENINGKAT
7	DINAS PU, DAN PENATAAN RUANG	84.46%	A	MEMUASKAN	85.82%	A	MEMUASKAN	1.36%	MENINGKAT
8	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	83.84%	A	MEMUASKAN	82.70%	A	MEMUASKAN	-1.14%	MENURUN
9	DINAS KOPERASI UKM	79.18%	BB	SANGAT BAIK	83.19%	A	MEMUASKAN	4.01%	MENINGKAT
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	83.36%	A	MEMUASKAN	86.34%	A	MEMUASKAN	2.98%	MENINGKAT
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	83.77%	A	MEMUASKAN	86.26%	A	MEMUASKAN	2.49%	MENINGKAT
12	DINAS PARIWISATA	85.00%	A	MEMUASKAN	85.51%	A	MEMUASKAN	0.51%	MENINGKAT
13	DINAS PERHUBUNGAN	85.86%	A	MEMUASKAN	85.86%	A	MEMUASKAN	0.00%	TETAP
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	84.56%	A	MEMUASKAN	84.56%	A	MEMUASKAN	0.00%	TETAP
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	81.53%	A	MEMUASKAN	85.88%	A	MEMUASKAN	4.35%	MENINGKAT
16	DINAS KESEHATAN	85.00%	A	MEMUASKAN	88.49%	A	MEMUASKAN	3.49%	MENINGKAT
17	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	80.33%	A	MEMUASKAN	82.02%	A	MEMUASKAN	1.69%	MENINGKAT
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	86.06%	A	MEMUASKAN	86.22%	A	MEMUASKAN	0.16%	MENINGKAT

NO	SKPD	2019			2020			SELISIH	KETERANGAN
		NILAI (%)	KATEGORI		NILAI (%)	KATEGORI			
19	DINAS SOSIAL	80.28%	A	MEMUASKAN	80.07%	A	MEMUASKAN	-0.21%	MENURUN
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	82.07%	A	MEMUASKAN	84.27%	A	MEMUASKAN	2.20%	MENINGKAT
21	DINAS TENAGA KERJA	82.05%	A	MEMUASKAN	81.95%	A	MEMUASKAN	-0.10%	MENURUN
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	84.60%	A	MEMUASKAN	84.93%	A	MEMUASKAN	0.33%	MENINGKAT
23	DINAS PERTANIAN	82.61%	A	MEMUASKAN	84.28%	A	MEMUASKAN	1.67%	MENINGKAT
24	DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH	82.55%	A	MEMUASKAN	84.03%	A	MEMUASKAN	1.48%	MENINGKAT
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	83.61%	A	MEMUASKAN	85.77%	A	MEMUASKAN	2.16%	MENINGKAT
26	RSUD PPP	84.85%	A	MEMUASKAN	85.89%	A	MEMUASKAN	1.04%	MENINGKAT
27	INSPEKTORAT	87.73%	A	MEMUASKAN	87.98%	A	MEMUASKAN	0.25%	MENINGKAT
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	82.60%	A	MEMUASKAN	82.60%	A	MEMUASKAN	0.00%	TETAP
29	BAKESBANGPOL	85.26%	A	MEMUASKAN	85.26%	A	MEMUASKAN	0.00%	TETAP
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	85.40%	A	MEMUASKAN	86.80%	A	MEMUASKAN	1.40%	MENINGKAT
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	83.64%	A	MEMUASKAN	85.98%	A	MEMUASKAN	2.34%	MENINGKAT
32	BAPPEDA	86.10%	A	MEMUASKAN	86.69%	A	MEMUASKAN	0.59%	MENINGKAT
33	PELAKSANA BPBD	81.70%	A	MEMUASKAN	82.34%	A	MEMUASKAN	0.64%	MENINGKAT
34	KANTOR CAMAT LINGSAR	81.87%	A	MEMUASKAN	82.50%	A	MEMUASKAN	0.63%	MENINGKAT
35	KANTOR CAMAT GUNUNGSARI	84.72%	A	MEMUASKAN	84.87%	A	MEMUASKAN	0.15%	MENINGKAT
36	KANTOR CAMAT BATULAYAR	83.13%	A	MEMUASKAN	83.50%	A	MEMUASKAN	0.37%	MENINGKAT
37	KANTOR CAMAT LABUAPI	82.45%	A	MEMUASKAN	83.55%	A	MEMUASKAN	1.10%	MENINGKAT
38	KANTOR CAMAT KEDIRI	82.63%	A	MEMUASKAN	83.22%	A	MEMUASKAN	0.59%	MENINGKAT
39	KANTOR CAMAT NARMADA	82.19%	A	MEMUASKAN	82.58%	A	MEMUASKAN	0.39%	MENINGKAT
40	KANTOR CAMAT GERUNG	74.64%	BB	SANGAT BAIK	80.31%	A	MEMUASKAN	5.67%	MENINGKAT
41	KANTOR CAMAT KURIPAN	81.19%	A	MEMUASKAN	81.44%	A	MEMUASKAN	0.25%	MENINGKAT
42	KANTOR CAMAT SEKOTONG	83.38%	A	MEMUASKAN	83.91%	A	MEMUASKAN	0.53%	MENINGKAT

NO	SKPD	2019			2020			SELISIH	KETERANGAN
		NILAI (%)	KATEGORI		NILAI (%)	KATEGORI			
43	KANTOR CAMAT LEMBAR	76.85%	BB	SANGAT BAIK	80.25%	A	MEMUASKAN	3.40%	MENINGKAT
	JUMLAH	83.23%	A	MEMUASKAN	84.47%	A	MEMUASKAN	1.24%	MENINGKAT

Gerung, 30 Maret 2021

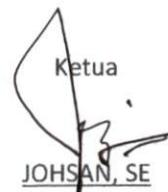
Mengetahui :
 Plt. Inspektur
 Kabupaten Lombok Barat



H. ILHAM, S.Pd, M.Pd
 Nip. 19651231 198803 1 240



Ketua

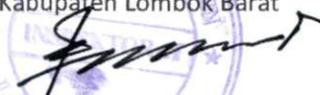


JOHSAN, SE
 Nip. 19640905 198603 1 021

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2020
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO	SKPD	NILAI (%)	KATEGORI	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	88.49%	A	MEMUASKAN
2	INSPEKTORAT	87.98%	A	MEMUASKAN
3	SEKRETARIAT DEWAN	87.52%	A	MEMUASKAN
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	86.80%	A	MEMUASKAN
5	BAPPEDA	86.69%	A	MEMUASKAN
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	86.60%	A	MEMUASKAN
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	86.34%	A	MEMUASKAN
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	86.26%	A	MEMUASKAN
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	86.22%	A	MEMUASKAN
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	85.98%	A	MEMUASKAN
11	RSUD PPP	85.89%	A	MEMUASKAN
12	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	85.88%	A	MEMUASKAN
13	DINAS PERHUBUNGAN	85.86%	A	MEMUASKAN
14	DINAS PU, DAN PENATAAN RUANG	85.82%	A	MEMUASKAN
15	SEKRETARIAT DAERAH	85.77%	A	MEMUASKAN
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	85.77%	A	MEMUASKAN
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	85.73%	A	MEMUASKAN
18	DINAS PARIWISATA	85.51%	A	MEMUASKAN
19	BAKESBANGPOL	85.26%	A	MEMUASKAN
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	84.93%	A	MEMUASKAN
21	KANTOR CAMAT GUNUNGSARI	84.87%	A	MEMUASKAN
22	DINAS PEMADAM DAN KEBAKARAN	84.71%	A	MEMUASKAN
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	84.56%	A	MEMUASKAN
24	DINAS PERTANIAN	84.28%	A	MEMUASKAN
25	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	84.27%	A	MEMUASKAN
26	DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH	84.03%	A	MEMUASKAN

NO	SKPD	NILAI (%)	KATEGORI	KETERANGAN
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	83.93%	A	MEMUASKAN
28	KANTOR CAMAT SEKOTONG	83.91%	A	MEMUASKAN
29	KANTOR CAMAT LABUAPI	83.55%	A	MEMUASKAN
30	KANTOR CAMAT BATULAYAR	83.50%	A	MEMUASKAN
31	KANTOR CAMAT KEDIRI	83.22%	A	MEMUASKAN
32	DINAS KOPERASI UKM	83.19%	A	MEMUASKAN
33	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	82.70%	A	MEMUASKAN
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	82.60%	A	MEMUASKAN
35	KANTOR CAMAT NARMADA	82.58%	A	MEMUASKAN
36	KANTOR CAMAT LINGSAR	82.50%	A	MEMUASKAN
37	PELAKSANA BPBD	82.34%	A	MEMUASKAN
38	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	82.02%	A	MEMUASKAN
39	DINAS TENAGA KERJA	81.95%	A	MEMUASKAN
40	KANTOR CAMAT KURIPAN	81.44%	A	MEMUASKAN
41	KANTOR CAMAT GERUNG	80.31%	A	MEMUASKAN
42	KANTOR CAMAT LEMBAR	80.25%	A	MEMUASKAN
43	DINAS SOSIAL	80.07%	A	MEMUASKAN
	JUMLAH	84.47%	A	MEMUASKAN

Mengetahui :
 Plt. Inspektur
 Kabupaten Lombok Barat

 H. IILHAM, S.Pd, M.Pd
 Nip. 19651231 198803 1 240

Gerung, 30 Maret 2021

Ketua

 JOHSAN, SE
 Nip. 19640905 198603 1 021

NO	OBYEK EVALUASI	REKAPITULASI NILAI HASIL EVALUASI												JUMLAH NILAI	KETERANGAN							KATEGORI			
		Perencanaan Kinerja (30%)		Pengukuran Kinerja (25%)			Pelaporan Kinerja (15%)			Evaluasi Internal (10%)			Pencapaian Sasaran (20%)		AA	A	BB	B	CC	C	D				
		Renstra (10%)	PKT (20%)	Pemenuhan Pengukuran (5%)	Kualitas Pengukuran (12,5%)	Implementasi Pengukuran (7,5%)	Pemenuhan Pelaporan (3%)	Penyajian Inf. Kinerja (7,5%)	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	Pemenuhan Evaluasi (2%)	Kualitas Evaluasi (5%)	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	OUTPUT (7,5%)										OUTCOME (12,5%)		
32	BAPPEDA	10.00%	19.10%	5.00%	11.88%	4.69%	3.00%	5.71%	3.60%	2.00%	5.00%	1.88%	5.00%	9.84%	86.69%		√							MEMUASKAN	
		29.10%		21.56%			12.31%			8.88%			14.84%											MEMUASKAN	
33	PELAKSANA BPBD	8.40%	17.05%	4.38%	10.63%	4.69%	2.81%	7.50%	4.50%	1.88%	3.89%	2.25%	5.00%	9.38%	82.34%		√							MEMUASKAN	
		25.45%		19.69%			14.81%			8.02%			14.38%											MEMUASKAN	
34	KANTOR CAMAT LINGSAR	8.47%	18.80%	5.00%	10.94%	4.06%	2.81%	6.96%	3.60%	1.71%	3.27%	1.88%	5.00%	10.00%	82.50%		√							MEMUASKAN	
		27.27%		20.00%			13.38%			6.85%			15.00%											MEMUASKAN	
35	KANTOR CAMAT GUNUNGSARI	8.78%	18.80%	5.00%	10.94%	4.69%	3.00%	6.96%	3.60%	1.71%	3.27%	1.88%	5.00%	11.25%	84.87%		√							MEMUASKAN	
		27.58%		20.63%			13.56%			6.85%			16.25%											MEMUASKAN	
36	KANTOR CAMAT BATULAYAR	9.50%	17.80%	5.00%	10.94%	3.75%	3.00%	5.98%	3.60%	1.71%	3.27%	1.88%	5.00%	12.08%	83.50%		√							MEMUASKAN	
		27.30%		19.69%			12.58%			6.85%			17.08%											MEMUASKAN	
37	KANTOR CAMAT LABUAPI	8.94%	18.55%	5.00%	10.00%	4.69%	2.81%	6.70%	3.60%	1.71%	3.27%	1.88%	6.00%	10.42%	83.55%		√							MEMUASKAN	
		27.49%		13.11%			6.85%			16.42%														MEMUASKAN	
38	KANTOR CAMAT KEDIRI	10.00%	19.40%	5.00%	10.94%	4.38%	3.00%	5.71%	3.60%	1.71%	2.99%	1.50%	5.00%	10.00%	83.22%		√							MEMUASKAN	
		29.40%		20.31%			12.31%			6.20%			15.00%											MEMUASKAN	
39	KANTOR CAMAT NARMADA	8.63%	18.80%	5.00%	10.94%	4.69%	2.81%	5.98%	3.60%	2.00%	3.89%	1.88%	5.00%	9.38%	82.58%		√							MEMUASKAN	
		27.43%		20.63%			12.39%			7.77%			14.38%											MEMUASKAN	
40	KANTOR CAMAT GERUNG	8.31%	17.65%	5.00%	9.38%	4.69%	3.00%	5.71%	3.60%	1.71%	3.27%	1.88%	5.00%	11.13%	80.31%		√							MEMUASKAN	
		25.96%		19.06%			12.31%			6.85%			16.13%											MEMUASKAN	
41	KANTOR CAMAT KURIPAN	10.00%	18.80%	5.00%	10.00%	4.69%	2.81%	5.18%	2.70%	1.71%	3.68%	1.88%	5.00%	10.00%	81.44%		√							MEMUASKAN	
		28.80%		19.69%			10.69%			7.27%			15.00%											MEMUASKAN	
42	KANTOR CAMAT SEKOTONG	8.31%	18.80%	5.00%	10.63%	4.38%	3.00%	5.71%	3.15%	1.71%	3.48%	1.88%	6.00%	11.88%	83.91%		√							MEMUASKAN	
		27.11%		20.00%			11.86%			7.06%			17.88%											MEMUASKAN	
43	KANTOR CAMAT LEMBAR	8.63%	19.10%	5.00%	10.00%	4.38%	3.00%	6.08%	3.60%	1.88%	3.48%	1.88%	4.50%	8.75%	80.25%		√							MEMUASKAN	
		27.73%		19.38%			12.68%			7.23%			13.25%											MEMUASKAN	
	JUMLAH	1180.19%		886.61%			557.06%			328.60%			679.84%		3632.08%										
	RATA-RATA	27.45%		20.62%			12.95%			7.64%			15.81%		84.47%										

MENGETAHUI,
 PTL INSPEKTUR KABUPATEN LOMBOK BARAT



I. ILHAM, S.Pd, M.Pd
 Nip. 19651231 198803 1 240



TIM EVALUASI LAKIP SKPD TAHUN 2020
 KABUPATEN LOMBOK BARAT
 KETUA



JONSAH, S.E
 Nip. 19640905 198603 1 021

**RINCIAN HASIL EVALUASI KOMPONEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2020
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO	OBYEK EVALUASI	REKAPITULASI NILAI HASIL EVALUASI												
		Perencanaan Kinerja (30%)		Pengukuran Kinerja (25%)			Pelaporan Kinerja (15%)			Evaluasi Internal (10%)			Pencapaian Sasaran (20%)	
		Renstra (10%)	PKT (20%)	Pemenuhan Pengukuran (5%)	Kualitas Pengukuran (12,5%)	Implementasi Pengukuran (7,5%)	Pemenuhan Pelaporan (3%)	Penyajian Inf. Kinerja (7,5%)	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	Pemenuhan Evaluasi (2%)	Kualitas Evaluasi (5%)	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	OUTPUT (7,5%)	OUTCOME (12,5%)
1	SEKRETARIAT DAERAH	8.63%	18.80%	5.00%	10.63%	4.69%	2.81%	7.23%	3.60%	2.00%	3.68%	1.88%	6.00%	10.83%
2	SEKRETARIAT DEWAN	10.00%	19.70%	5.00%	12.50%	6.88%	3.00%	6.25%	3.60%	2.00%	4.31%	2.25%	5.00%	7.04%
3	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.47%	18.80%	5.00%	11.88%	4.69%	3.00%	7.23%	3.60%	1.88%	3.68%	1.88%	6.50%	10.00%
4	DINAS PEMADAM DAN KEBAKARAN	8.26%	19.40%	5.00%	11.88%	4.69%	3.00%	7.23%	3.60%	1.88%	3.89%	1.88%	5.00%	9.02%
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	9.09%	19.10%	5.00%	11.88%	4.69%	3.00%	5.98%	3.60%	1.88%	3.89%	1.88%	7.00%	8.76%
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.00%	16.80%	5.00%	10.31%	4.69%	3.00%	6.43%	3.60%	1.71%	3.89%	1.88%	7.00%	11.63%
7	DINAS PU, DAN PENATAAN RUANG	8.47%	17.80%	5.00%	10.00%	4.69%	3.00%	6.16%	3.60%	1.88%	4.10%	2.25%	6.50%	12.38%
8	DINAS PERUMAHAN DAN	9.75%	19.40%	5.00%	11.25%	4.69%	3.00%	5.89%	3.60%	1.88%	2.99%	1.50%	4.50%	9.26%
9	DINAS KOPERASI UKM	8.00%	17.30%	5.00%	11.25%	4.69%	3.00%	5.98%	3.60%	1.88%	4.31%	2.25%	5.00%	10.94%
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.50%	19.40%	5.00%	11.88%	4.69%	3.00%	6.70%	3.60%	1.71%	3.68%	1.88%	5.00%	10.31%
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.00%	19.40%	5.00%	12.50%	4.69%	3.00%	6.43%	3.60%	1.71%	3.27%	1.88%	5.00%	9.79%
12	DINAS PARIWISATA	9.50%	18.20%	5.00%	10.31%	4.69%	3.00%	6.70%	3.60%	1.88%	3.89%	1.88%	5.00%	11.88%
13	DINAS PERHUBUNGAN	8.78%	20.00%	5.00%	10.94%	4.69%	3.00%	5.71%	3.60%	1.71%	3.68%	1.88%	7.50%	9.38%
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.63%	18.80%	5.00%	11.25%	4.69%	2.81%	5.98%	3.60%	2.00%	3.68%	1.88%	5.00%	11.25%
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.63%	19.40%	5.00%	12.50%	4.69%	2.81%	6.08%	3.60%	1.88%	4.31%	1.88%	5.00%	10.13%
16	DINAS KESEHATAN	9.50%	17.80%	5.00%	11.56%	4.69%	3.00%	6.96%	3.60%	1.88%	4.17%	2.25%	6.00%	12.08%
17	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	10.00%	17.80%	3.75%	10.63%	4.38%	2.06%	5.63%	3.60%	2.00%	4.31%	2.25%	5.00%	10.63%

REKAPITULASI NILAI HASIL EVALUASI														
NO	OBJEK EVALUASI	Perencanaan Kinerja (30%)		Pengkukuran Kinerja (25%)			Pelaporan Kinerja (15%)			Evaluasi Internal (10%)			Pencapaian Sasaran (20%)	
		Renstra (10%)	PKT (20%)	Pemenuhan Pengukuran (5%)	Kualitas Pengukuran (12,5%)	Implementasi Pengukuran (7,5%)	Pemenuhan Pelaporan (3%)	Penyajian Inf. Kinerja (7,5%)	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	Pemenuhan Evaluasi (2%)	Kualitas Evaluasi (5%)	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	OUTPUT (7,5%)	OUTCOME (12,5%)
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	8.63%	19.10%	5.00%	11.25%	4.38%	3.00%	6.96%	3.60%	1.88%	4.31%	1.88%	5.00%	11.25%
19	DINAS SOSIAL	9.03%	18.40%	5.00%	10.94%	4.38%	2.25%	5.63%	3.60%	1.88%	4.10%	2.25%	4.50%	8.13%
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	8.00%	16.80%	5.00%	10.63%	4.69%	2.81%	7.23%	3.60%	1.88%	3.27%	1.88%	6.00%	12.50%
21	DINAS TENAGA KERJA	8.63%	19.10%	5.00%	10.94%	4.38%	3.00%	7.23%	3.38%	1.88%	3.68%	1.88%	3.50%	9.38%
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.63%	19.10%	5.00%	10.94%	4.38%	3.00%	7.23%	3.60%	1.88%	3.68%	1.88%	5.00%	10.63%
23	DINAS PERTANIAN	8.41%	16.10%	5.00%	10.63%	4.69%	3.00%	7.50%	3.60%	1.88%	5.00%	3.00%	5.00%	10.48%
24	DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH	7.28%	18.80%	5.00%	10.63%	4.69%	2.81%	7.23%	3.15%	1.88%	3.20%	1.88%	5.00%	12.50%
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.63%	18.80%	5.00%	11.25%	4.69%	2.81%	5.98%	3.60%	2.00%	3.89%	1.88%	6.00%	11.25%
26	RSUD PPP	10.00%	19.10%	5.00%	10.94%	4.69%	3.00%	6.96%	3.60%	1.88%	4.73%	2.25%	5.00%	8.75%
27	INSPEKTORAT	7.72%	19.10%	5.00%	11.56%	4.69%	2.81%	7.23%	3.60%	2.00%	4.52%	2.25%	5.00%	12.50%
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER	8.00%	18.25%	5.00%	11.25%	4.69%	3.00%	5.71%	3.60%	1.71%	3.89%	1.88%	7.50%	8.13%
29	BAKESBANGPOL	8.57%	18.55%	5.00%	10.63%	4.69%	2.81%	5.98%	3.60%	1.88%	3.89%	1.88%	7.50%	10.29%
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8.47%	19.10%	5.00%	10.94%	4.69%	3.00%	7.50%	4.50%	1.88%	4.38%	2.25%	5.00%	10.10%
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.46%	19.70%	5.00%	10.94%	4.69%	2.81%	6.70%	3.60%	1.71%	3.48%	1.88%	5.00%	12.03%
32	BAPPEDA	10.00%	19.10%	5.00%	11.88%	4.69%	3.00%	5.71%	3.60%	2.00%	5.00%	1.88%	5.00%	9.84%
33	PELAKSANA BPBD	8.40%	17.05%	4.38%	10.63%	4.69%	2.81%	7.50%	4.50%	1.88%	3.89%	2.25%	5.00%	9.38%
34	KANTOR CAMAT LINGSAR	8.47%	18.80%	5.00%	10.94%	4.06%	2.81%	6.96%	3.60%	1.71%	3.27%	1.88%	5.00%	10.00%
35	KANTOR CAMAT GUNUNGSARI	8.78%	18.80%	5.00%	10.94%	4.69%	3.00%	6.96%	3.60%	1.71%	3.27%	1.88%	5.00%	11.25%
36	KANTOR CAMAT BATULAYAR	9.50%	17.80%	5.00%	10.94%	3.75%	3.00%	5.98%	3.60%	1.71%	3.27%	1.88%	5.00%	12.08%
37	KANTOR CAMAT LABUAPI	8.94%	18.55%	5.00%	10.00%	4.69%	2.81%	6.70%	3.60%	1.71%	3.27%	1.88%	6.00%	10.42%
38	KANTOR CAMAT KEDIRI	10.00%	19.40%	5.00%	10.94%	4.38%	3.00%	5.71%	3.60%	1.71%	2.99%	1.50%	5.00%	10.00%
39	KANTOR CAMAT NARMADA	8.63%	18.80%	5.00%	10.94%	4.69%	2.81%	5.98%	3.60%	2.00%	3.89%	1.88%	5.00%	9.38%
40	KANTOR CAMAT GERUNG	8.31%	17.65%	5.00%	9.38%	4.69%	3.00%	5.71%	3.60%	1.71%	3.27%	1.88%	5.00%	11.13%

NO	OBYEK EVALUASI	REKAPITULASI NILAI HASIL EVALUASI												
		Perencanaan Kinerja (30%)		Pengukuran Kinerja (25%)			Pelaporan Kinerja (15%)			Evaluasi Internal (10%)			Pencapaian Sasaran (20%)	
		Renstra (10%)	PKT (20%)	Pemenuhan Pengukuran (5%)	Kualitas Pengukuran (12,5%)	Implementasi Pengukuran (7,5%)	Pemenuhan Pelaporan (3%)	Penyajian Inf. Kinerja (7,5%)	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	Pemenuhan Evaluasi (2%)	Kualitas Evaluasi (5%)	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	OUTPUT (7,5%)	OUTCOME (12,5%)
41	KANTOR CAMAT KURIPAN	10.00%	18.80%	5.00%	10.00%	4.69%	2.81%	5.18%	2.70%	1.71%	3.68%	1.88%	5.00%	10.00%
42	KANTOR CAMAT SEKOTONG	8.31%	18.80%	5.00%	10.63%	4.38%	3.00%	5.71%	3.15%	1.71%	3.48%	1.88%	6.00%	11.88%
43	KANTOR CAMAT LEMBAR	8.63%	19.10%	5.00%	10.00%	4.38%	3.00%	6.08%	3.60%	1.88%	3.48%	1.88%	4.50%	8.75%
	JUMLAH	379.64%	800.55%	213.13%	473.84%	199.81%	124.65%	277.82%	154.58%	79.42%	164.51%	84.90%	232.50%	447.34%
	RATA-RATA	8.83%	18.62%	4.96%	11.02%	4.65%	2.90%	6.46%	3.59%	1.85%	3.83%	1.97%	5.41%	10.40%

MENGETAHUI,
Pit. INSPEKTUR KABUPATEN LOMBOK BARAT



TIM EVALUASI LAKIP SKPD TAHUN 2020
KABUPATEN LOMBOK BARAT
KETUA

JOHSAO S.E
Nip. 19640905 198603 1 021